

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016**

Oleh : Sugandi

Email : Sugandig37@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The administration of the village administration is a subsystem of the administration of government, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of the community. Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and prosperity by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance in accordance with the essence of the problems and priorities of the needs of the village community. The implementation of community empowerment activities carried out by the Raja Bejamu Kepulauan Government should be able to socialize that community participation in governance and development of Kepulauan is very important.

This study aims to describe the Implementation of Community Empowerment Activities in Raja Bejamu District Chief of Sinaboi District, Rokan Hilir District in 2016. The location of this research was conducted in Raja Bejamu District Chief of Sinaboi District. Data collection techniques are done by interview and documentation. The method used in this research is qualitative descriptive.

Empowerment emphasizes the process of giving people the ability to be empowered, encouraging or motivating individuals to have the ability or empowerment to determine their life choices. Based on the results of the study showed that the implementation of Community Empowerment Activities in the Bejamu King's Commitment in Sinaboi District, Rokan Hilir Regency in 2016 was not optimal, where the goal of implementing community empowerment for the creation of community independence had not been achieved, this was caused by the first three (3) factors due to lack of budget, the second is Quality of Human Resources, and thirdly the Lack of Participation of the Bejamu Raja Kepulauan Society.

Keywords: *Implementation, Society Empowerment*

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa merupakan subsistem

penyelenggaraan Pemerintahan,
sehingga Desa mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian maupun daya dalam arti kekuasaan atau posisi-tawar. Pemberdayaan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pemberdayaan

masyarakat Desa pasal 126 ayat (1-3) menyatakan:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Kemudian dalam Pasal 127 menjelaskan juga tentang program masyarakat desa yang meliputi sebagai berikut :

1. Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mendorong partisipasi Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluhan dalam pasal 5 Penghulu mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kepenghuluan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kepenghuluan;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kepenghuluan yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepenghuluan;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kepenghuluan
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kepenghuluan;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan kepenghuluan;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kepenghuluan;
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan kepenghuluan kepada masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan dan perkembangan Kepenghuluan Raja Bejamu akan tercapai.

Berikut fenomena dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016. Hal ini dapat dibuktikan tidak tercapainya tujuan program pemberdayaan ikan air tawar dan program pelatihan menjahit di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat. dari setiap pertemuan maupun pelatihan yang dilaksanakan jumlah kehadiran masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan ini selalu menurun.
2. Minimnya Anggaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu.

Tabel 1.1

**Anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan Terkait Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Bidang Pembinaan Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu Tahun
2016**

No	Rincian Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 3.600.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 348.000
	Pemberdayaan Keagamaan	Rp. 3.252.000
2.		Rp. 10.000.000
	- Honor Juri	Rp. 1.050.000
	- Perlengkapan	Rp. 1.800.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 950.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 1.700.000
	- Hadiah	Rp. 4.500.000
3.	Pemberdayaan LPMKep	Rp. 8.000.000
	- Budidaya Ikan Air Tawar	Rp. 4.000.000
	- Pelatihan Menjahit	Rp. 4.000.000
4.	Imam Mesjid	Rp. 14.400.000
5.	Gharim Mesjid	Rp. 7.200.000
6.	Guru Mengaji Tradisional	Rp. 9.000.000
7.	Peringatan HUT RI	Rp. 5.000.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 950.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 1.050.000
	- Hadiah	Rp. 3.000.000
8.	Kegiatan Sanggar Seni	Rp. 2.000.000
	- Honor Pelatih	Rp. 500.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 650.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 850.000
9.	Kegiatan Olah Raga	Rp. 5.000.000
	- Honor Pelatih	Rp. 1.000.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 600.000
	- Pembelian Alat Olah Raga	Rp. 3.400.000
Jumlah		Rp. 64.200.000

Sumber : APBDES Kepenghuluan Raja Bejamu Tahun 2016

RUMUSAN MASALAH

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu sangat minim seharusnya pemerintah memberikan anggaran yang lebih untuk lembaga pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan Fenomena diatas penulis merumuskan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016.
2. Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016.

KONSEP TEORI

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. Menurut prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpiliharanya

tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki konsep. Menurut winarni (1998:75) konsep pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi dan daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat ini bahwa pemberdayaan juga tidak hanya ditujukan kepada yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi dapat diberikan kepada yang memiliki daya namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian.

Sumadyo (2001) merumuskan Terdapat tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan, yang disebut sebagai Tri Bina yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2015:113) menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

1. Bina Manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Pengembangan Kapasitas Individu,

- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan,
 - c. Kapasitas Kapasitas Sistem jejaring.
2. Bina Usaha
- Menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan yaitu meliputi;
- a. Pemilihan Komoditas dan jenis usaha,
 - b. Studi kelayakan perencanaan bisnis,
 - c. Pembentukan badan usaha,
 - d. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan,
 - e. Pengelolaan SDM dan Pengembangan karir.
3. Bina Lingkungan
- Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi. Bina Lingkungan meliputi;
- a. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan,
 - b. Tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhi segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan SDA dan lingkungan.
4. Bina Kelembagaan
- Telah dikemukakan di depan, bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan. Pengertian tentang

kelembagaan sering dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Kata Kelembagaan. Sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata–sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk realisasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya ;

- a. *Komponen Person*. Di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- b. *Komponen Kepentingan*. Di mana orang-orang tersebut pasti diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c. *Komponen Aturan*. Di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- d. *Komponen Struktur*. Di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisi dengan kemauannya sendiri.

2. Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah Partisipasi adalah, Keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu

kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan partisipasinya.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan (Theodorson, 1969).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) yang secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Pelaksanaan Budidaya Ikan Air Tawar

Pelaksanaan Budidaya ikan air tawar merupakan usaha pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepenghuluan Raja Bejambu. Kegiatan Budidaya Air Tawar mulai dilaksanakan pada bulan maret tahun 2016 dan mempunyai anggota 15 orang. Sebelum melaksanakan kegiatan budidaya ikan air tawar anggota budidaya ikan air tawar terlebih dahulu mendapat pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan tentang Budidaya Ikan Air Tawar.

Pelaksanaan Budidaya Ikan Air Tawar di kepenghuluan Raja Bejambu mempunyai beberapa tahapan pertama “pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, kedua Penyuluhan Budi Daya Perikanan Air Tawar, dan ketiga Pemasaran Ikan Air Tawar”, berikut isi dari kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar :

1. Pengadaan bibit, benih.
2. Pengadaan pakan.
3. Pengadaan kolam ikan.

Sementara kegiatan Penyuluhan Budi Daya Perikanan Air Tawar berikut merupakan isi kegiatannya:

1. Memberi pakan yang baik.
2. Pemilihan bibit yang baik.
3. Tempat kolam ikan yang baik

Selanjutnya kegiatan Pemasaran Ikan Air Tawar berikut merupakan isi kegiatannya:

1. Menentukan panen yang tepat.
2. Tidak melakukan panen serentak.
3. Melihat kebutuhan ikan air tawar di masyarakat

Masyarakat semula sangat mendukung program Budidaya Perikanan Air Tawar ini dilaksanakan, dimana lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejambu yang menjadi penggerak utama program

ini. Namun dalam pelaksanaan program Budidaya Ikan Air Tawar ini begitu banyak gejala dan permasalahan yang terjadi terhadap program tersebut.

Menurut Winarni (1998:75) dalam pelaksanaannya konsep pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi dan daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

1. Pengembangan (*Enabling*)

a. Memotivasi

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari (Makmun, 2003).

b. Membangkitkan kesadaran

Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan potensi yang ada didalam diri masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan menyadarkan masyarakat supaya ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan budidaya ikan air tawar.

2. Memperkuat Potensi dan Daya (*Empowering*)

a. Pendidikan dan pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan yang dimaksudkan disini adalah pengetahuan kelompok budidaya ikan air tawar dalam mengelola budidaya ikan air tawar, program budidaya ikan air tawar akan terlaksana dengan efektif apabila kelompok budidaya ikan tawar mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai

cara pengelolaan budidaya ikan air tawar.

b. Modal

Modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan dana atau anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program budidaya ikan air tawar, kelompok budidaya ikan air tawar mendapat bantuan modal dari pemerintah kepenghuluan sebesar Rp 4000.000 untuk pelaksanaan Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat budidaya ikan air tawar yang telah direncanakan. Dengan adanya modal atau anggarannya yang disiapkan oleh pemerintah kepenghuluan tentunya akan mempermudah jalannya pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar kepenghuluan Raja Bejamu.

c. Teknologi

Teknologi yang dimaksud disini adalah alat atau peralatan yang memudahkan kelompok budidaya ikan air tawar Raja Bejamu dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar Kepenghuluan Raja Bejamu. Teknologi tepat guna sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan untuk meningkatkan mutu dan produksi.

d. Informasi

Informasi yang dimaksud adalah segala bentuk informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu.

e. Lapangan kerja

Lapangan kerja yang dimaksud adalah dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat

kepenghuluan, diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat kepenghuluan. Sehingga banyak masyarakat kepenghuluan dapat diberdayakan secara ekonomi.

f. Pasar

Pasar menjadi hal akhir yang sangat penting, karena dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan barang dan jasa yang siap dipasarkan atau dijual. Distribusi akan lebih efektif apabila ada penampung atau agen yang akan menerima langsung hasil dari pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat. sehingga dengan demikian akan lebih menguntungkan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pelatihan Menjahit

Pelaksanaan pelatihan menjahit adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan, sehingga mampu berusaha serta dalam pelaksanaannya lebih menengutamakan pada praktek dari pada teori. Pelatihan sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal yang digunakan sebagai wahana bagi seseorang untuk belajar dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri, hingga seseorang itu memiliki keterampilan hidup yang dapat digunakan untuk menjadikannya lebih berguna, dengan keterampilan hidup yang dimilikinya, akan mampu menjadikan kehidupannya menjadi sejahtera dan menjadi manusia yang berguna.

Pelatihan menjahit yang dilaksanakan di Kepenghuluan Raja Bejamu adalah kegiatan dari lembaga pemberdayaan masyarakat

Kepenghuluan Raja Bejamu. pelaksanaan pelatihan menjahit mencakup tiga kegiatan yaitu persiapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Anggota dalam pelatihan menjahit ini berjumlah 15 orang pada umumnya juga merupakan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Raja Bejamu, dengan adanya program pelatihan menjahit dari pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu diharapkan mampu membantu peserta meningkatkan kemampuan, Serta mendorong peserta membuka lapangan kerja sendiri atau industri.

Sasaran utama dalam program ini adalah warga kepenghuluan Raja Bejamu itu sendiri yang antara lain terdiri dari :

1. Pengganguran dari keluarga pra sejahtera dan ibu rumah tangga yang belum mempunyai penghasilan tetap.
2. Pengganguran putus sekolah, korban PHK yang ingin berkerja.

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini kepada masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu berupa ceramah, diskusi serta praktek. Kegiatan dimulai dengan pemberian materi tentang tujuan kegiatan, proses belajar selama berlangsungnya kegiatan sampai hasil yang akan dicapai. pelaksanaan pelatihan menjahit diselenggarakan dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Kegiatan pelatihan menjahit kepenghuluan Raja Bejamu.

1. Pembukaan pengetahuan dan dasar-dasar teori menjahit.
2. Membuat pola baju dan memotong kain yang benar.
3. Menjahit baju dengan pola yang telah dibuat sendiri

Faktor yang mampu memengaruhi keberhasilan pelatihan menjahit

diantaranya motivasi warga belajar mengikuti pelatihan menjahit itu sendiri, tingginya minat warga belajar, materi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar, metode belajar yang bervariasi dan tidak membosankan, sumber belajar yang berkompetensi di bidangnya, serta terlaksananya kegiatan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang mencukupi (Fahriati & Syurani, 2018). Menurut Winkel (1998), menyatakan bahwa motivasi belajar adalah seluruh energi pendorong intelektual dalam diri seseorang yang membangkitkan semangat, perhatian untuk mengikuti pembelajaran yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Motivasi penting karena motivasi adalah pendorong, penggerak dan pendukung tingkah laku individu sehingga giat dalam bekerja dan antusias dalam pencapaian tujuan sesuai harapan. Dalam pelaksanaan pelatihan menjahit di kepenghuluan Raja Bejamu para anggota dimotivasi oleh pemerintah kepenghuluan dengan memberikan bantuan berupa anggaran yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu.

Pelatihan menjahit ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan pada bidang menjahit, dengan harapan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi yang ada. bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan namun tidak memiliki keterampilan khusus, pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat

Kepenghuluan Raja Bejam. pelatihan menjahit ini sangat membantu sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan dalam menjahit. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam menjahit, pelaksanaan program pelatihan menjahit ini menjadi tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga keterampilan yang dimilikinya bisa dikembangkan secara lebih terarah.

Pendidikan dan pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan raja bejamu. apabila masyarakat mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang cukup maka akan mempermudah pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan raja bejamu dan begitu juga sebaliknya apabila masyarakat mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka inilah yang menjadi tantangan pemerintah kepenghuluan untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat supaya lebih baik dan mempunyai keterampilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan sehingga masyarakat tidak bergantung kepada pihak lain. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan mengatur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sendiri tanpa bergantung pada pihak lain dan dapat

bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Kemandirian masyarakat merupakan hasil yang diharapkan dalam pemberdayaan. Masyarakat perlu diberdayakan dulu dengan pemberdayaan, kemudian mereka menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan, mengatur, dan mengurus diri sendiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat khususnya segi ekonomi dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lebih rinci, Gunawan Sumodiningrat mengemukakan beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, antara lain:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya;
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan

makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan masyarakat;

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhannya (Muhhamad Vathul Aziz, 2011: 56).

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu

1. Minimnya Anggaran Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk pembiayaan kegiatan, karena jika anggaran tidak ada, bisa dipastikan kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan maksimal. Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk memberdayakan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu. Sehingga anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan.

Tabel 1.1

**Anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan Terkait Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Bidang Pembinaan Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu Tahun
2016**

No	Rincian Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 3.600.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 348.000
	Pemberdayaan Keagamaan	Rp. 3.252.000
2.		Rp. 10.000.000
	- Honor Juri	Rp. 1.050.000
	- Perlengkapan	Rp. 1.800.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 950.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 1.700.000
	- Hadiah	Rp. 4.500.000
3.	Pemberdayaan LPMKep	Rp. 8.000.000
	- Budidaya Ikan Air Tawar	Rp. 4.000.000
	- Pelatihan Menjahit	Rp. 4.000.000
4.	Imam Mesjid	Rp. 14.400.000
5.	Gharim Mesjid	Rp. 7.200.000
6.	Guru Mengaji Tradisional	Rp. 9.000.000
7.	Peringatan HUT RI	Rp. 5.000.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 950.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 1.050.000
	- Hadiah	Rp. 3.000.000
8.	Kegiatan Sanggar Seni	Rp. 2.000.000
	- Honor Pelatih	Rp. 500.000
	- Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 650.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 850.000
9.	Kegiatan Olah Raga	Rp. 5.000.000
	- Honor Pelatih	Rp. 1.000.000
	- Makanan dan Minuman	Rp. 600.000
	- Pembelian Alat Olah Raga	Rp. 3.400.000
Jumlah		Rp. 64.200.000

Sumber : APBDES Kepenghuluan Raja Bejamu Tahun 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan sudah di anggarkan oleh pemerintah Kepenghuluan Raja Bejamu. Namun anggaran untuk lembaga pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu masih minim. Dengan anggaran yang minim lembaga pemberdayaan masyarakat sangat kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu..

2. Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih sejahtera dan mandiri. Supaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu berjalan dengan baik, maka perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini kualitas sumber daya manusia di kepenghuluan raja bejamu masih

tergolong rendah, mayoritas penduduk di Kepenghuluan Raja Bejamu hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Jika dilihat dari perspektif tingkat pendidikan hal tersebut memperkecil peluang kerja.

Masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu sebagian besar bermata pencaharian Nelayan dan sebagian lainnya sebagai petani, buruh, dan pedagang. Latar belakang pendidikan yang rendah juga mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan Raja Bejamu.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan Raja Bejamu. Selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu tidak semua masyarakat berperan aktif dan turun serta dalam mendukung program lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang tidak berpartisipasi tersebut kebanyakan menganggap kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu bukanlah prioritas utama untuk dilakukan.

Kurangnya partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh agenda sosialisasi terkait pemberdayaan yang cenderung membosankan, selain itu sikap apatis

yang masih tinggi juga menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu.

Kesimpulan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luar agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Secara umum dari hasil penelitian dilapangan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian maka Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 belum optimal.
2. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Raja Bejamu, faktor-faktor tersebut antara lain:
 1. Minimnya anggaran lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Raja Bejamu.
 2. Kualitas Sumberdaya Manusia.
 3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kepenghuluan Raja Bejamu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rahmatika Creative Design.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi pemberdayaan masyarakat. Bandung ; Humaauro Utama.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Ssoebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Bandar maju.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Akan Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Perkerjaan Sosial*. Ba
- Syafiee, Inu Kencana. 2005. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Revfika Aditama.
- Taliziduhu, Ndraha. 2005. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Winarni, Tri. 2000. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa*
- Menyongsong Abad 21*. Yogyakarta. Aditia Media.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Taun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan.
- Jurnal**
- Anton Firdaus. 2017. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 : Vol.4 No 2
- Muhammad Nurman. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir : vol.4 no.1
- Web**
- Ditjenpp.kemenkumham.go.id.
www.rohilkab.go.id.
 id.wikipedia.org.